

ABSTRAK

Analisis Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Umbulharjo Pemerintahan Kota Yogyakarta

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aktivitas yang dimulai dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan tersebut dilakukan untuk menunjang tertib administrasi dari Barang Milik Daerah yang dipunyai oleh suatu instansi pemerintahan. Kecamatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk melaksanakan penatausahaan guna menunjang tertib administrasi atas Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kekuasaannya. Dasar hukum yang mengatur terkait penatausahaan atas Barang Milik Daerah (BMD) yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui apakah penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah di Kantor Kecamatan Umbulharjo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara Umum, Kecamatan Umbulharjo telah melaksanakan penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam penyaluran barang belum menggunakan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB).

Kata kunci: Barang Milik Daerah, Penatausahaan, Permendagri No. 17 Th 2007

ABSTRACT

Analisis Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Umbulharjo Pemerintahan Kota Yogyakarta

Administration of Regional Property is an activity that starts from bookkeeping, inventory, and reporting. Administration is done to support the orderly administration of the Regional Property owned by a government agency. District as Regional Device Work Unit is obliged to carry out administration to support the orderly administration of Regional Property which is in its power. The legal basis governing the Administration of Regional Property is the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 17 of 2007. The purpose of this thesis is to know whether the administration and reporting of local property in the District Office Umbulharjo already in accordance with applicable rules. In general, Umbulharjo District has implemented the administration and reporting of Regional Property in accordance with the rules in force. However, in the distribution of goods have not used the Letter of Order Distribution of Goods.

Keywords: Regional Property, Administration, Permendagri No. 17th of 2007